



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3535-3547

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Medan Marelan

Debby Ardani^{1✉}, Muhammad Husni Thamrin²

Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara

Email: debbyardn31@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Medan Marelan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan belum optimal, apabila dilihat dari segi produktivitas, segi kualitas layanan, segi responsivitas, segi responsibilitas, dan dari segi akuntabilitas, namun dari segi akuntabilitas sudah dijalankan kegiatan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Usulan Pokok pikiran DPRD.

Kata Kunci: *Kinerja, Organisasi, Infrastruktur, Pemeliharaan Jalan, Penyelenggaraan*

Abstract

The aim of this research is to determine the performance of the Public Works and Spatial Planning Department of North Sumatra Province in maintaining roads in Medan Marelan District. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that the performance of the Public Works and Spatial Planning Department of North Sumatra Province in Road Maintenance in Medan Marelan District is not optimal. When viewed from a productivity perspective, terms of service quality, responsibility perspective, and finally, if seen from an accountability perspective, activities have been carried out in accordance with the interests of the community as outlined in the DPRD's Main Proposed Plan document.

Keyword: *Performance, Organizational, Infrastructure, Road Maintenance, Administration*

PENDAHULUAN

Organisasi publik merupakan lembaga pemerintahan yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat dan negara. Tujuan dari adanya organisasi publik adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam menyediakan produk berupa barang, jasa hingga regulasi yang dibentuk demi kepentingan khalayak ramai. Penyelenggaraan pelayanan organisasi publik juga tergolong ke dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik kinerja merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan karena merepresentasikan kualitas dari organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil kerja yang dinilai secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, Mangkunegara (Tsauri, 2014).

Salah satu produk pelayanan publik yang dihasilkan oleh organisasi publik yaitu penyediaan infrastruktur jalan. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang keberadaannya sangat penting bagi masyarakat serta dibutuhkan pengelolaan oleh negara untuk menjamin kualitas dan mutu yang baik. Dalam hal ini jalan merupakan salah satu infrastruktur dan faktor pendukung dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan merupakan prasarana yang paling sering digunakan dalam bermobilisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah diberlakukannya era otonomi daerah, kewenangan atas jalan dibebankan kepada tiga pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 20 menyebutkan bahwa Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh: Pemerintah pusat, untuk jalan nasional; Pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi; Pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau Pemerintah kota, untuk jalan kota. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya undang-undang tersebut menjadikan pemerintah di setiap tingkatan memiliki tanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan jalan. Hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan agar penyelenggaraan jalan dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh di setiap wilayah di Indonesia demi menjamin kualitas yang baik dari barang publik tersebut. Dalam hal ini unsur pelaksana dalam penyelenggaraan jalan yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Penyelenggaraan jalan di setiap provinsi dilakukan oleh masing-masing pemerintah yang bertanggung jawab. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pada Pasal 15 menjelaskan bahwa wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Berdasarkan Peraturan

Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas bina marga dan bina konstruksi menaungi bidang perencanaan, bidang pemeliharaan dan bidang pelaporan dan evaluasi.

Salah satu jalan yang mengalami kerusakan di Provinsi Sumatera Utara yaitu Jalan Marelان Raya. Jalan Marelان Raya merupakan jalan yang diklasifikasikan sebagai jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi sebagaimana Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035. Jalan provinsi menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 pasal 9 ayat 3 dijelaskan merupakan jalan kolektor dalam sebuah sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota (dalam satu provinsi tersebut), atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.



Gambar 1. Kondisi Kerusakan Jalan Marelان Raya
(Sumber: metroindo, 2022)

Kondisi jalan yang berstatus jalan provinsi di Kecamatan Medan Marelان sudah terjadi cukup lama, kerusakan jalan tersebut tepatnya berada di depan pasak tradisional pasar V. Jalan berlubang tersebut disertai dengan genangan air yang cukup dalam akibat hujan deras dan menyebabkan pengendara mengalami kesulitan saat melintasnya. Jalan ini telah diperbaiki terakhir kali yaitu pada tahun yang sama tepatnya pada bulan Februari tahun 2022. Ironisnya, belum hitungan tahun dikerjakan telah mengalami kerusakan kembali.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh warga dan pengguna jalan untuk menyampaikan kondisi ini kepada pihak terkait serta memasang spanduk yang berisi himbauan bagi pengguna jalan agar berhati-hati saat melintas, dan mengunggahnya ke media sosial dengan harapan bahwa pemerintah akan menanggapi keluhan tersebut. Dengan tingginya intensitas kendaraan yang melintasi jalan protokol tersebut seperti anak-anak sekolah, buruh pabrik dan buruh pelabuhan Belawan dan para petani yang membawa hasil perkebunan dan pertaniannya untuk dijual ke kota, dan berbagai kendaraan dengan muatan besar seperti truk yang melintas menjadi salah satu faktor penyebab semakin parahnyā kerusakan jalan dan disertai dengan tidak dilakukannya pemeliharaan pada jalan tersebut (Waspada, 2022).

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu terkait penyelenggaraan jalan

yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga sebagai referensi ilmiah terhadap pokok masalah, sehingga peneliti dapat melihat perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulunya. Salah satu penelitian yang terkait dalam pemeliharaan jalan yaitu penelitian yang ditulis oleh Rusli, Z (2015), diperoleh bahwa hasil penelitian menunjukkan kondisi dimana terdapat kendala-kendala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pemeliharaan jalan di Kabupaten Toba Samosir sehingga pemeliharaan tidak dapat dilakukan secara efektif. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan penghambat tersebut diantaranya yaitu (1) Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, (2). Jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini peneliti menemukan fakta bahwa jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Tobasa tidak sebanding dengan jumlah keluhan masyarakat, dan juga tidak sebanding dengan luas jalan yang harus ditangani. Dengan banyaknya jumlah keluhan atas kerusakan jalan yang diajukan oleh masyarakat tidak mampu diatasi oleh jumlah pegawai yang terbatas oleh dinas tersebut.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian oleh Pramudita, dkk (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa saat dilakukannya wawancara kepada masyarakat yang bersangkutan bahwa mereka telah melayangkan keluhan atas kerusakan jalan kepada dinas terkait melalui forum online yang telah disediakan. Pihak Dinas PUBMSDA juga membenarkan bahwa adanya keluhan masyarakat yang diiringi dengan keluhan yang disebabkan oleh faktor terjadinya hujan yang cukup deras belakangan ini. Namun, masyarakat merasa bahwa tahapan hingga sampai ke proses perbaikan kerusakan jalan tergolong cukup lama. Setelah pihak Dinas PU menanggapi keluhan tersebut kemudian dilakukannya survei oleh satgas jalan sesuai dengan laporan yang masuk, setelah melalui tahap survei, tahap selanjutnya yaitu proses penggambaran lokasi, setelah dilakukannya penggambaran lokasi dilanjutkan dengan tahap perencanaan dan kemudian dilakukannya perbaikan jalan.

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Sari (2022). Hasil penelitian yang mengukur kinerja dengan menggunakan 5 indikator penelitian yang dikemukakan oleh Dwiyanto (dalam A Fauzi, 2020:16) yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas menunjukan bahwa kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam melakukan pemeliharaan jalan sudah cukup optimal, yang ditunjukkan dari hasil survey ruas jalan Provinsi Lampung pada Desember 2018 sebesar 77,227% dalam kondisi mantap (kondisi baik+sedang).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan adanya kekurangan dalam hal kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan jalan yang dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang berada di bawah struktur organisasi

Kementerian PUPR, masih ditemui beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan jalan seperti pemeliharaan jalan yang tidak dilakukan secara rutin, jalan rusak yang dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, tindakan pemerintah yang tidak cukup tanggap dalam menangani keluhan masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan sebuah perubahan dalam organisasi tersebut agar mampu meningkatkan kinerjanya dan menggerakkan seluruh anggota dalam organisasi tersebut sehingga terciptanya sebuah kinerja yang berkualitas baik yang mampu menyelesaikan semua permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan. Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung di lapangan yaitu dengan observasi dan wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan seseorang yang dianggap relevan dan mampu memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan provinsi di Kecamatan Medan Marelan. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk teknik keabsahan data pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan triangulasi data. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan merupakan triangulasi metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi selama penelitian berlangsung serta berbagai dokumen yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian dan Analisis Data

1. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan

Berdasarkan indikator Agus Dwiyanto (2006) mengenai penilaian kinerja organisasi yang mengukur tingkat produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, peneliti menggunakan kelima indikator ini karena berdasarkan permasalahan yang terjadi dianggap relevan untuk mengukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan.

a. Produktivitas

Produktivitas merupakan konsep yang mengukur tingkat efisiensi seseorang dalam bekerja serta mengukur tingkat efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai penyelenggaraan pelayanan publik. Berkaitan dengan tingkat produktivitas dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa selama ini masih sering dijumpai kasus kerusakan jalan oleh Bidang Bina Marga yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti alam dan juga non alam. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan yaitu curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga bahan konstruksi atas jalan tersebut mengalami kerusakan. Faktor non alam yang menyebabkannya yaitu seperti bahan konstruksi yang sudah mencapai umur rencana sehingga menyebabkan penurunan kualitas atas badan jalan yang perlu ditindaklanjuti, dan juga semakin tingginya mobilitas kendaraan di lalu lintas. Kerusakan jalan yang terjadi tidak langsung diperbaiki melainkan harus melalui tahapan dan alur yang telah ditentukan yaitu setelah dilakukannya survey atas kondisi jalan maka permasalahan tersebut akan dijadikan agenda untuk ditindak lanjuti pencarian solusi, apakah memerlukan pemeliharaan jalan atau rekonstruksi secara keseluruhan yang akan membutuhkan waktu dalam setiap alurnya. Selain itu, diperoleh juga informasi mengenai waktu penyelesaian pelayanan bahwa untuk menyelesaikan pelayanan dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, hal tersebut dikarenakan terdapat prosedur dan tahapan yang harus dilalui untuk melaksanakan pemeliharaan jalan.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan jalan sendiri terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pihak dinas dalam menyelesaikan persoalan tersebut, Sumber daya yang terbatas menjadi salah satu penyebab terhambatnya program pemeliharaan jalan yang mengakibatkan tidak optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan sebuah konsep yang menunjukkan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa tujuan dari dilakukannya pemeliharaan jalan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jalan sebagai penerima layanan dalam merasakan fasilitas atas infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah yaitu menciptakan dan mewujudkan kondisi jalan yang mantap dan optimal dalam melayani kebutuhan lalu lintas. Meskipun demikian, sampai saat ini masih seringkali ditemui kasus kerusakan jalan yang tersebar di berbagai wilayah, baik wilayah kota maupun daerah-daerah kecil. Beberapa faktor yang menyebabkan jalan mengalami kerusakan, curah hujan yang tinggi yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas bahan konstruksi yang digunakan dan disertai dengan umur jalan tersebut yang sudah semakin tua dan semakin menipis. Selain itu, laju intensitas kendaraan yang semakin tinggi di kota yang sedang berkembang juga menyebabkan jalan mengalami kerusakan, kelebihan tonase yang ditanggung oleh jalan semakin meningkatkan potensi kerusakan jalan. Oleh karena itu, bidang bina marga sebagai organisasi publik yang melaksanakan penyelenggaraan jalan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas jalan untuk dapat dinikmati penggunaannya oleh masyarakat dengan memanfaatkan anggaran dan segala bentuk sumber daya yang dimiliki.

c. Responsivitas

Responsivitas merupakan daya tanggap dan kesiapan organisasi pemerintah dalam menghadapi perkembangan lingkungan sosial yang semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh bidang bina marga dilakukan berdasarkan hasil survey kondisi jalan secara langsung yang dilakukan dengan penilikan jalan. Selain itu, informasi yang diperoleh dari masyarakat dan pengguna lalu lintas pada umumnya menjadi bantuan pihak dinas untuk mengetahui kondisi jalan diluar jadwal kerja yang dilakukan oleh pihak terkait. Setiap kerusakan yang dilayangkan oleh masyarakat diupayakan semaksimal mungkin untuk diatasi dan menjadi agenda untuk rencana kegiatan selanjutnya oleh bina marga.

d. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan konsep yang menjelaskan dan mengukur kinerja sebuah organisasi yang didasarkan pada pelaksanaan kegiatan ataupun program yang diselenggarakan oleh organisasi publik sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dan sejalan dengan kebijakan birokrasi yang berlaku. Berdasarkan hasil

wawancara dilapangan diperoleh bahwa Dinas PUPR Bina Marga menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan jalan dengan berpedoman pada regulasi dan prinsip organisasi yang berlaku yaitu yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 yang didalamnya terdapat penjelasan lebih rinci terkait kondisi ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan lanjutan berdasarkan berbagai pertimbangan sesuai dengan kondisi aktual. Pencapaian tujuan dan sasaran disusun berdasarkan rencana yang ingin dicapai dalam periode waktu yang akan datang dan merupakan hal utama yang mendasari terlaksananya program kerja yang dijalankan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada, baik sumber daya yang dimiliki serta kepentingan masyarakat yang tengah berkembang.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan yang dijalankan oleh instansi pemerintah tunduk dan patuh pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Beberapa pernyataan yang diperoleh dari informan menyatakan bahwa sebagai organisasi perangkat daerah yang diberikan kewenangan oleh Gubernur dalam mengurus urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas PUPR sangat berupaya untuk menjalankan program dan kegiatan yang dilakukan yang berorientasi pada kenyamanan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas publik dan kebutuhan lalu lintas. Dengan berpedoman pada regulasi dan undang-undang yang berlaku Dinas PUPR menjalankan setiap kegiatannya dengan memperhatikan setiap prinsip yang ada yang mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yang pada akhirnya menjadikan konsep akuntabilitas publik organisasi perangkat daerah ini mempunyai kedudukan yang baik dan bertanggung jawab.

2. Hambatan Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat kendala yang dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan yaitu terkait sumber daya yang dimiliki oleh DBMBK Provsu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa informan yang menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat yaitu anggaran yang terbatas dan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang memadai. Oleh karena itu diharapkan bahwa setiap pegawai di bidang lingkupnya mampu menyelesaikan tanggung jawab yang diemban dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta

pengetahuan agar mampu meningkatkan kinerjanya di dalam organisasi dalam merancang sistem perencanaan, pelaksanaan hingga pengevaluasian penyelenggaraan jalan.

Pembahasan

1. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan

Berdasarkan penetapan kelas jalan yang dijelaskan dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan tahun 2015-2035 menyebutkan bahwa jalan Marelan Raya Kecamatan Medan Marelan merupakan jalan yang ditetapkan sebagai jalan provinsi. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara yang saat ini telah bergabung dengan Bidang Cipta karya dan Sumber Daya Air beralih menjadi satu dengan nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Namun standar dan pedoman yang dijalankan oleh bidang bina marga saat ini masih merujuk pada peraturan dan regulasi yang berlaku sebelum bidang-bidang tersebut bergabung. Bidang Bina marga sendiri merupakan salah satu bidang yang berada di bawah Dinas PUPR yang menjalankan urusan dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi seksi perencanaan, pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan. Untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan, seluruh seksi yang berada di bawah struktur bidang bina marga saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya.

Tahapan awal yang dilakukan oleh bidang bina marga adalah melakukan survey jalan yang dilakukan oleh tim bidang bina marga yang ditunjuk. Survey jalan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi jalan terkait. Survei pemeliharaan jalan ini diantaranya meliputi survei inventarisasi jalan dan survei kondisi jalan. Setelah didapati hasil atas survei inventarisasi jalan dan survei kondisi jalan, data tersebut akan dijadikan agenda untuk dicari penyelesaian solusinya. Kegiatan ini disebut dengan pemrograman pemeliharaan jalan.

Setelah dilakukannya pemrograman pemeliharaan jalan, tahap selanjutnya yaitu pembiayaan pemeliharaan jalan. rencana pembiayaan pemeliharaan jalan atas hasil pemrograman didasarkan pada pertimbangan sosio ekonomi, potensi dan kemampuan penyelenggaraan jalan di wilayah dan daerah sesuai dengan status jalannya serta prioritas penanganannya. Selanjutnya, kategori jalan yang akan mendapatkan penanganan rehabilitasi jalan adalah jalan dengan kriteria ruas ruas jalan yang semula ditangani melalui

program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana; bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun; bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan; bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.

Yang terakhir yaitu kategori jalan yang akan mendapatkan penanganan rekonstruksi adalah jalan yang memiliki kriteria rusak berat/kritis dan atau jalan dalam keadaan runtuh.

Pemeliharaan rutin jalan selalu dilakukan sepanjang tahunnya diantaranya dengan cara pemeliharaan/pembersihan bahu jalan, pemeliharaan sistem drainase, pemeliharaan pemotongan tumbuhan atau tanaman liar, pengisian celah atau retak, hingga penambalan lubang.

2. Hambatan Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Medan Marelan

Faktor yang menjadi penghambat sebuah organisasi publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik sangat bervariasi, mulai dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki kurang terampil, sarana dan prasarana yang kurang memadai, anggaran yang kurang, perencanaan yang kurang matang, hingga faktor eksternal yang mempengaruhinya seperti kondisi alam serta kondisi sosial. Oleh karena itu keterlibatan seluruh pihak sangat dibutuhkan, tidak hanya pemerintah yang bertugas menyediakan pelayanan tersebut melainkan pihak-pihak lain seperti masyarakat yang ikut andil dalam mendukung program dan kegiatan pemerintah. Para pihak lain yang tidak terlibat langsung juga sangat diharapkan keterlibatannya dalam menjaga lingkungan dikarenakan dalam hal ini infrastruktur yang digunakan adalah jenis barang publik yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, anggaran yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara menjadin salah satu penyebab tidak mampunya organisasi publik tersebut dalam melakukan pemeliharaan jalan di Kecamatan Medan Marelan sebagaimana pada Tabel

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2019-2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN KE-		REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan	424.89 2.871.8 28,76	328.73 9.333. 183,00	333.09 8.152.2 29,00	313.217.5 93.572,0 0	78,40	95,28
2.	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	121.006. 239.107 ,00	68.485 .944.3 09,23	108.764 .909.30 8,00	68.011.14 5.837,00	89,99	99,31
3.	Program Pembinaan Jalan dan Jembatan	69.119.8 47.440, 25	30.861 .444.9 35,55	57.916. 477.69 6,00	29.134.9 55.327,4 0	83,79	94,41

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, 2023

Berdasarkan Tabel 1 mengenai anggaran bidang bina marga pada tahun 2019-2020 terlihat bahwa anggaran yang direalisasikan pada dua tahun tersebut tidak sesuai dengan rencana alokasi yang tercantum di dalam rencana strategis. Rasionalisasi dan adanya keterbatasan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Bina Marga pada saat itu mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya penanganan sesuai dengan umur rencana, sehingga pada akhirnya target jalan mantap yang sebelumnya telah ditetapkan oleh instansi tidak mampu dicapai. Selain itu, faktor sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi faktor lain yang menyebabkan hal tersebut, Pemanfaatan informasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring kurang dimaksimalkan sehingga rencana yang disusun kurang maksimal. Dalam sebuah organisasi publik, pegawai merupakan sumber daya yang keberadaannya sangat penting, oleh karena itu kualitas dan kemampuan yang dimiliki harus berkualitas untuk mampu menyelesaikan setiap persoalan publik yang beragam. Berdasarkan penyajian data, masih banyak ditemui pegawai dengan kualifikasi yang tidak seimbang, mayoritas didominasi oleh pegawai yang berkualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 232 orang dan jenjang S1 sebanyak 240 orang. Oleh karena itu dalam hal ini diharapkan bahwa setiap pegawai di bidang lingkungannya mampu menyelesaikan tanggung jawab yang diemban dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan agar mampu meningkatkan kinerjanya di dalam organisasi dalam merancang sistem

perencanaan, pelaksanaan hingga pengevaluasian penyelenggaraan jalan.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan tingkat produktivitas, kinerja Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara apabila dilihat dari terutama dalam pemeliharaan jalan, dinilai sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya program kegiatan yang dirancang untuk pemeliharaan jalan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, berdasarkan kualitas layanan, kinerja Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil yang belum baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih terjadinya kerusakan jalan pada tahun yang sama setelah kegiatan pemeliharaan jalan tersebut dilakukan, peristiwa ini membuktikan bahwa masih ada kekurangan dalam proses pemeliharaan jalan terutama dari segi perencanaan yang kurang tepat sehingga menyebabkan bahan konstruksi jalan mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Apabila dilihat berdasarkan tingkat responsivitas, kinerja Dinas PUPR juga menunjukkan hasil yang belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan pada ruas Jalan Marelan Raya yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan tanggung jawab, Dinas PUPR Provinsi menunjukkan hasil yang cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dengan dilakukannya pemeliharaan jalan sesuai dengan prinsip administrasi dan kebijakan yang berlaku pada organisasi tersebut. Terakhir apabila dilihat dari segi akuntabilitas sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan dilakukannya kegiatan pemeliharaan jalan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Armenita, Y. 2019. Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam pemeliharaan Jalan di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Skripsi. Universitas Islam Riau. Riau
- Elisabet, M. 2015. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir. *Jom FISIP*. 2(1):1-13.
- Fattah, A. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. CV Harfa Creative. Bandung
- Fidiarso, W. 1998. Metode Evaluasi Dengan Pengamatan Secara Visual Pada Manajemen Pemeliharaan Jalan Kabupaten (Studi Kasus: Jln. Kodya Magelang). Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Hikmawati, F. 2020. Metodologi Penelitian. RAJAWALI PERS. PT RajaGrafindo. Depok
- Kamaroellah, A. 2014. Manajemen Kinerja (Konsep, Desain, Implementasi dan Penilaian Kinerja). Penerbit Pustaka Radja. Surabaya.

- Pramudita, M., Murti, I., Rahmadanik, D. 2022. Responsivitas Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Menangani Keluhan Kerusakan Jalan Kabupaten Sidoarjo. Seminar Nasional 2022 "Transformasi Digital Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi". 1(1):1-5.
- Ransun, Y., Kalangie, F., Sendow, Y. 2017. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah. Jurnal Eksekutif. 1(1):1-11
- Ritonga, I. 2022. Kajian Pengembangan UMKM dan Potensi Koperasi Melalui Inovasi Berbasis Teknologi di Kecamatan Medan Marelan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. Medan
- Rosa, R., Winarti., Suranto, J. 2022. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kota Surakarta (Studi Kasus Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pada Bidang Bina Marga). Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial.
- Rumawas, W. 2021. Manajemen Kinerja. UNSRAT Press. Manado.
- Rusli, Z., & Elisabet, M. 2015. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol. 2, No. 1
- Sari, W.Y. 2022. KINERJA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN JALAN (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2021). Skripsi. Universitas Lampung.
- Sedarmayanti. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil). Penerbit Refika Aditama: Bandung.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung. Bandung
- Tsauri, S. 2014. Manajemen Kinerja (Performance Management). Penerbit STAIN Jember Press: Jember.
- Wijaya, C., Hidayat, R. 2020. Manajemen Kinerja. Penerbit CV.Pusdikra Mitra Jaya. Medan.